**MAKALAH**

**MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA**

**“GEOPOLITIK INDONESIA”**



OLEH DOSEN PENGAMPU : Dr.NUR WAHID,S.Sos,.M.Si

KELOMPOK 11

1.NABILA ISMAIL MATTA (NIM 105841100722)

2.MUHAMAD NAZAR ABADI (NIM 105841100922)

3.AHMAD SYAM GUNAWAN (NIM 105841100522)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

**BAB 1**

**A.PENDAHULUAN**

Konsep Nusantara dianggap mewakili dengan apa yang dinamakan National-Staat seperti yang diucapkan Soekarno saat ia berpidato Lahirnya Pancasila lewat penekanan “kehendak untuk bersatu dari persamaan karakter”. Ditambahkan pula, untuk penegasan wilayah Indonesia, Ir. Soekarno, 1945 menambahkan tentang peradaban National-Staat yang dianggap menemui puncak kejayaan saat Imperium Sriwijaya dan Imperium Majapahit. Disini meluruskan bahwa konsep Nusantara itubukan sebagai Negara Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau tetapi melainkan konsep Nusantara sebagai Negara Maritim yang sebagai penghubung dari beberapa pulau dan itu sebagai pengontrol dan memanfaatkan laut sebagai syarat dari jalur perdagangan dan mencapai kesejahteraan.

Suatu bangsa meyakini bahwa kebenaran yang hakiki atas kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, pencipta alam semesta. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk lainnya melalui akal pikiran dan budi nuraninya. Namun kemampuannya dalam menggunakan akal pikiran dan budi nurani tersebut terbatas, sehingga manusia yang satu dan yang lain tidak memiliki tingkat kemampuan yang sama. Ketidaksamaan tersebut menimbulkan perbedaan pendapat, kehidupan, kepercayaan dalam hubungan dengan penciptanya dan melaksanakan hubungan dengan sesamanya, dan dalamcara melihat serta memahami sesuatu.Perbedaan-perbedaan inilah yang kitasebut keanekaragaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengaruh ini timbul darihubungan timbal balik antara filososfibangsa, ideologi, aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam wilayahnya serta pengalaman sejarahnya. Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya.

**BAB II**

**B. PEMBAHASAN**

Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Kata “wawasan” itu sendiri berasal dari wawas (bahasa Jawa) yang artinya melihat atau memandang. Dengan penambahan akhiran “an” kata ini secara harfiah berarti: cara penglihatan atau cara tinjau atau cara pandang. Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam ekstensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan propinisional), regional,serta global. Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, suatu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama yaitu, bumi atau ruang di mana bangsa itu hidup, jiwa tekad dan semangat manusianya atau rakyatnya dan lingkungan sekitarnya.

**PENGERTIAN GEOPOLITIK**

Istilah geopolitik semula oleh pencetusnya, Frederich Ratzel (1944-1904), diartikan sebagai ilmu bumi politik (Political Geography), Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer (1869-1946) menjadi Geographical Politic. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu Bumi Politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik (Geographical Politic) mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik dapat diartikan sebagai Ilmu Bumi Politik Terapan (Applied Political Geography). Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik yang keduan:

1. geopolitik sebagai ilmu : memberikan wawasan obyektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia.
2. Geopolitik sebagai ideology (landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara): hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara dan mempertahankan semangat kebangsaan.

**A.Teori Geopolitik**

1. Teori Geopolitik Fredefich Ratzel Pokok-pokok teori Ratzel, disebut Teori Ruang, menyebutkan bahwa:

1. Pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup), yang memerlukan ruang hidup (lebensraum) cukup agar dapat turnbuh dengan subur melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.
2. Kekuatan suatu negara harus marnpu mewadahi pertumbuhannya. Makin luas ruang dan potensi geografi yang diternpati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh.
3. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup terus dan berlangsung.
4. Apabila ruang hidup negara sudah tidak dapat memenuhi keperluan, ruang itu dapat dipeluas dengan mengubah batas-batas negara baik secara damai maupun melalui jalan kekerasan atau perang.

Pandangan Ratzel tentang geopolitik menimbulkan dua aliran kekuatan, yaitu

* berfokus pada kekuatan di darat (kontinental)
* berfokus pada kekuatan di laut (maritim).

Melihat adanya efek persaingan dua aliran kekuatan yang bersumber dari teorinya, Ratzel meletakkan dasar-dasar suprastruktur geopolitik, yaitu bahwa kekuatan suatu negara harus mampu mewadahi tumbuhan kondisi dan kedudukan geografinya. Dengan demikian, esensi pengertian politik adalah penggunaan kekuatan fisik dalam rangka rnewujudkan keinginan atau aspirasi nasional suatu bangsa. Hal ini seiring kearah politik adu kekuatan dan adu kekuasaan dengan tujuan ekspansi.

2.Teori Geopolitik Rudolf Kjellen

Pokok-pokok teori Kjellen dengan tegas menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme hidup. Pokok teori tersebut terinspirasi oleh pendapat Ratzel vang .

Pokok-pokok teori Kjellen rnenyebutkan:

1. Negara merupakan satuan biologis, suatu organism hidup, yang memiliki intelektualitas. Negara dimungkinkan untuk mendapatkan ruang yang cukup luas agar kemampuan dan kekuatan rakyatnya dapat berkembang secara bebas.
2. Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi geopolitik, ekonomi politik, demo politik, dan krato politik (politik memerintah)
3. Negara harus mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya: ke dalam untuk mencapai persatuan dan kesatuan yang harmonis dan ke luar untuk mendapatkan batas-batas negara yang lebih baik. Sementara itukekuasaan Imperium Kontinental dapat mengontrol kekuatan maritim.

3.Teori Geopolitik Karl Haushofer

Pokok-pokok teori Haushofer pada dasarnya menganut teori Kjellen dan bersifat ekspansionis serta rasial, bahkan dicurigai sebagai teori yang menuju kepada peperangan. Teori Haushofer berkembang di Jerman dan mempengaruhi Adolf Hitler. Teori ini pun dikembangkan di Jepang dalam ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat materialisme dan fasisme. Inti teori Haushofer adalah:

1. Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam.
2. Kekuasaan Imperium Daratan dapat mengejar kekuasaan Imperium Maritim untuk menguasai pengawasan di laut.
3. Beberapa negara besar di dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia Barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia Timur Raya.
4. Geopolitik adalah doktin negara yang menitikberatkan perhatian kepada soal strategi perbatasan.
5. Ruang hidup bangsa dan tekanan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru dari kekayaan alam di dunia.
6. Geopolitik adalah landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup,

4.Teori Geopolitik Sir Halford Mackinder

Pokok teori Mackinder menganut “konsep kekuatan darat” dan mencetuskan Wawasan Benua. Teorinya menyatakan : Barang siapa dapat menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia) akan dapat menguasai “Pulau Dunia”, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Barang siapa dapat menguasai pulau dunia akhirnya dapat menguasai dunia

5. Teori Geopolitik Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan

Pokok teori kedua ahli tersebut menganut “konsep kekuatan maritim” dan mencetuskan Wawasan Bahari, yaitu kekuatan di lautan. Teorinya menyatakan: Barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya akan menguasai dunia.

6. Teori Geopolitik William Mitchel, Albert Saversky, Gulio Dauhet, dan John Frederick Charles Fuller

Keempat ahli geopolitik ini melahirkan teori Wawasan Dirgantara, yaitu kekuatan di udara. Dengan pemikiran bahwa di udara memiliki daya tangkis yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan.

7. Teori Geopolitik Nicholas J.Spykman

Pokok teori Spykman disebut “Teori Daerah Batas” atau “Teori Wawasan Kombinasi”, yaitau teori yang menggabungkan kekuatan darat. laut, dan udara yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suatu negara.

**B. Tujuan mempelajari konsep geopolitik**

1. Perspektif geopolitik menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan.
2. Perspektif geopolitik dapat menyatukan visi, misi dan tujuan kita dalam melangsungkan kehidupan bersama.

**C. Indonesia Sebuah Negara Kepulauan**

1. Zaman Kolonial Belanda

Di zaman colonial belanda, wilayah Indonesia berupa wilayah daratan saja, sedangkan wilayah laut teritorial tidak pernah diukur. Kemudian berdasarkan Ordonansi Tahun 1939 (Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939) lebar laut wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil diukur dari garis air rendah di pantai setiap pulau. Dengan kata lain, batas laut teritorial yang termaktub dalam Ordonansi 1939 itu membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

1. Deklarasi Djuanda

Sebagai sebuah wilayah berdaulat, pemerintah Indonesia menyadari bahwa ketentuan Ordonansi 1939 tidak sesuai dengan kepentingan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman mengenai wilayah perairan Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda, yang menyatakan:

1. Bahwa bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan memiliki sifat dan corak tersendiri.
2. Bahwa menurut sejarah sejak dulu kala kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.
3. Bahwa batas laut teritorial yang termaktub dalam Ordonansi 1939 memecah keutuhan teritorial Indonesia karena membagi wilayah daratan Indonesia ke dalam bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri.

Tujuan inti Deklarasi Djuanda adalah:

1. Perwujudan bentuk wilayah NKRI yang utuh dan bulat.
2. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepualuan (Archipelagic State Principle).
3. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI.

Untuk memperkuat kedudukan hukumnya, Deklarasi Djuanda dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sejak itu berubahlah bentuk wilayah nasional yang cara perhitungannya diukur 12 mil laut dari titik pulau terluar yang saling dihubungkan sehingga merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Selanjutnya Perpu No.4 Tahun 1060 diperkuat dengan Ketetapan MPR Tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993, konsep negara kepulauan dalam Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai “Wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional”.

Perjuangan mewujudkan konsep wawasan nasional yang dilakukan sejak tahun 1957 itu baru berhasil setelah diterimanya Hukum Laut Internasional III Tahun 1982, pokok-pokok asas negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut).

Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 82 melalui UndangUndang NO.17 Tahun 1985 pada tanggal 31 Desember 1985. Berlakunya UNCLOS 82 berpengaruh pada upaya pemanfaatan laut bagi kesejahteraan, seperti bertambahnya Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landasan KOntinen Indonesia.

1. Landasan Kontinen dan ZEE

Pada tanggal 17 februari 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi tentang Landasan Kontinen. Deklarasi tersebut kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia. Apabila disbanding isi deklarasi tahun 1957 dan tahun 1969, perbedaannya terdapat pada sifat konsep nusantara: konsep tahun 1957 merupakan konsep kewilayahan sedangkan konsep tahun 1969 lebih merupakan konsep politik dan ketatanegaraan.

Pada tanggal 21 Maret 1980 pemerintah Indonesia mengumumkan XEE Indonesia yang lebarnya 200 mil diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Di dalam pengumuman tersebut Indonesia menyatakan bahwa di dalam ZEE, Indonesia memiliki dan melaksanakan:

1. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya hayati dan nonhayati dan hak berdaulat lain atas eksplorasi dan eksploitasi sumber tenaga dari air, arus, dan angin.
2. Hak yurisdiksi yang berhubungan dengan: -

* pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan lainnya,
* penelitian ilmiah mengenai laut,
* pelestarian lingkungan laut, serta
* hal lain berdasarkan hukum internasional.

**D. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia**

1.Pengertian dan Hakikat

Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap inderawi, sedangkan istilah nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Untuk membina dan menyelenggarakan kehidupan nasional, bangsa Indonesia merumuskan suatu landasan visional yang dapat membangkitkan kesadaran untuk menjamin persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Landasan visional ini dikenal dengan istilah Wawasan Kebangsaan atau Wawasan Nasional dan diberi nama Wawasan Nusantara.

Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia, yang diberi pengertian sebagai cara pandang dan sikap bangsa insonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

2.Latar Belakang Filosofi

Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan berdasarkan latar belakang filosofi sebagai berikut:

1. Falsafah Pancasila

Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, keadilan dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tenteram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi.

1. Aspek Kewilayahan Nusantara

Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis, dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Hal tersebut menjadi aspek yang melatarbelakangi pengembangan Wawasan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia mengandung beraneka ragam kekayaan alam baik yang di dalam maupun di atas permukaan bumi, potensi di udara dan ruang antariksa dan jumlah penduduk yang besar yang terdiri atas berbagai suku yang masing-masing memiliki budaya, adat istiadat/ tradisi, dan pola kehidupan yang beraneka ragam.

1. Aspek Sosial Budaya

Wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatannya. Kepemilikan itu merupakan warisan yang diterima secara emosional dan bersifat mengikat secara kuat ke dalam, karena itu sangat sensitive sifatnya. Faktor-faktor negatif secara sosial-budaya dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa secara bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia, oleh karenanya harus diupayakan untuk dihilangkan.

1. Aspek Kesejarahan

Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya Organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini.

Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan aspek kesejarahan atas dasar pengalaman sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia.

3. Kedudukan Wawasan Nusantara

1. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia diciptakan oleh bangsa Indonesia dan dijalankan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.
2. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari tingkat kedudukannya sebagai berikut:
3. Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa berkedudukan sebagai landasan idiil.
4. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara berkedudukan sebagai landasan konstitusional .
5. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional.
6. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional berkedudukan sebagai landasan konsepsional.
7. RPJM sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional berkedudukan sebagai landasan operasional.

4. Asas Wawasan Nusantara.

Merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati,dipelihara dan diciptakan agar terwujud demi tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku/golongan) terhadap kesepakatan (commitment) bersama, terdiri dari:

1. Kepentingan bersama.
2. Keadilan.
3. Kejujuran .
4. Solidaritas.
5. Koordinasi/ kerjasama.
6. Kesetiaan terhadap ikrar bersama

5. Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan serta rambu – rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

6. Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan – kepentingan individu, kelompok, suku bangsa atau daerah. Kepentingan – kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat banyak. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang kehidupan demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan konsepsi visional Wawasan Nusantara.

7. Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara

1. Wadah
2. Wujud Wilayah

Batas ruang lingkup wilayah nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu Nusantara dibatasi oleh lautan dan daratan serta dihubungkan oleh perairan didalamnya.

1. Tata Inti Organisasi

Sistem pemerintahan, menganut sistem presidensial. Presiden memegang kekuasaan bersadarkan UUD 1945. Indonesia adalah Negara hukum ( Rechtsstaat) bukan Negara kekuasaan ( Machtsstaat ).

1. Tata Kelengkapan Organisasi

Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan dan organisasi masyarakat, kalangan pers seluruh aparatur negara.

1. Isi

Isi wawasan nusantara tercemin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi:

Cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan:

1. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
2. Rakyat Indonesia yang berkehidupan kebangsaan yang bebas.
3. Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
4. Tata Laku

Tata laku Wawasan Nusantara dapat dirinci dalam dua unsur:

1. Tata laku Batiniah, yang tumbuh dan terbentuk karena kondisi dalam proses pertumbuhan hidupnya, pengaruh keyakinan pada suatu agama/kepercayaan termasuk tuntututan bagi budi pekerti, serta pengaruh kondisi kekuasaan yang memungkinkan berlangsungnya kebiasaan-kebiasaan hidupnya
2. Tata laku Lahiriah, yang dituangkan ke dalam suatu pola tata laksana yang dapat dirinci menjadi: tata perencanaan, tata pelaksanaan, dan tata pengawasan.

Penerapan dari unsur wadah, isi, dan tata laku Wawasan Nusantara dapat dikembangkan sebagai berikut:

* + 1. Isi NKRI berupa falsafah Pancasila dan UUD 1945
    2. Wadah berupa Nusantara, yang manakala diisi atau diberi isi menampakkan wujud dan wajahnya sebagai Wawasan Nusantara
    3. Tata laku NKRI berupa UUD 1945 yang apabila dilaksanakan dan diterapkan berdasarkan Wawasan Nusantara akan menghasilkan Ketahanan Nasional Indonesia.

Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Dalam Rangka Menelaah Geostrategi Kita tidak boleh lepas dari landasannya terutama geopolitik dan konsepsinya adalah ketahanan nasional

1. **Geopolitik**

Ilmu Geopolitik adalah pengetahuan yang mempelajari tentang potensi, yang dimiliki oleh suatu bangsa, atas dasar jati dirinya dan merupakan kekuatan, serta kemampuan untuk Ketahanan Nasional. Pada hakikatnya geopolitik mengajarkan agar dapat selalu diciptakan persatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI, berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yaitu untuk kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan, serta kepentingan nasional.

1. **Geostrategi**

Konsepsi dasar dari Geostrategi Indonesia adalah Ketahanan Nasional, berdimensi Astagatra, artinya segenap kehidupan nasional yang sangat kompleks dipetakan secara sederhana, namun tetap dapat mencerminkan kehidupan nasional yang nyata(Carter & Chalk, 1998). Astagrata meliputi Trigrata Alamiah dan Pancagatra Sosial. Trigatra Alamiah terdiri dari Geografi (wilayah), sumber kekayaan alam dan kependudukan. Sedangkan Pancagatra sosial terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan disingkat Ipoleksosbudhankam. Geostrategi pada hakikatnya sangat tergantung dari kemampuan bangsa dalam mengelola dan memanfaatkan Trigatra Alamiah guna meningkatkan Ketahanan pada Pancagatra.

**KESIMPULAN**

Geopolitik adalah system politik atau peraturan-peraturan dalam kebijaksanaan dan strategi nasional yang di dorong oleh aspirasi nasional geografik suatu Negara,yang apabila di laksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada system politik suatu Negara.

Wawasan Nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selain itu, didalam pelaksanaanya, suatu wawasan nusantara lebih mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan guna mencapai tujuan nasional. Hal ini mewujudkan keberhasilan dari implementasi Wawasan Nusantara. Intinya, bagi bangsaIndonesia pengertiaan geopolitik adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia untuk mengena mengenal lingkungannya, yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945

**DAFTAR PUSTAKA**

Sulisworo Dwi, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif. 2012. Geopolitik Indonesia. Jurnal Geopolitik Indonesia. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan UAD.

Akmaliza,Anggi.2022.”Geopolitik Indonesia”.*Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran”*,1(2),92-109.

Astawa,S.Pt,MP,Dr.I Putu Ari,2017.”Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia”.*Jurnal Kewarganegaraan”,*